

PEMERATAAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN LAUT PERINTIS DI DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Yara Auliya Nurfadillah
Taruna Program Studi
Tatalaksana Angkutan Laut dan
Kepelabuhan
Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang
Jl.Singosari Raya No.2A
pipyara55@gmail.com

Nur Rohmah
Dosen Program Studi
Tatalaksana Angkutan Laut dan
Kepelabuhan
Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang
Jl.Singosari Raya No.2A
nurrohmah29@gmail.com

Andi Prasetiawan
Dosen Program Studi
Tatalaksana Angkutan Laut dan
Kepelabuhan
Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang
Jl.Singosari Raya No.2A
andiprasetiawan117@gmail.com

Abstract

Indonesia as a maritime country has areas that have difficulty in accessing transportation, namely Merauke. To overcome this, 8 perintis vessel service routes are provided. In 2021, the R-104 route KM. Sabuk Nusantara 91 is proposed to be removed. The purpose of this research is to find out the cause of route deletion and how the removal process is carried out. The research method uses descriptive qualitative by presenting the results of all studies and research. Data were collected by observation, interviews, and documentation studies. The results showed that the abolition of the R-104 route was due to the similarity of the route to the R-105 route and there was commercial shipping of PT. Pelni, which stops on the R-104 route, so that ship operations are considered no longer productive, even though the results of the SWOT analysis of perintis vessel services show progressive results. The process for eliminating route R-104 was proposed by the Merauke Regional Government in coordination with PPK Perintis Pangkalan Merauke, then submitted to the Directorate of Traffic and Sea Transportation for further study, and route R-104 was officially abolished during the National Coordination Meeting for Perintis.

Keywords: distribution, pangkalan Merauke, perintis vessel, route

Abstrak

Indonesia sebagai negara maritim memiliki wilayah yang kesulitan dalam akses transportasi yakni Merauke. Untuk mengatasinya disediakan 8 trayek pelayanan kapal perintis. Pada tahun 2021, trayek R-104 KM. Sabuk Nusantara 91 diusulkan untuk dihapus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab penghapusan trayek dan bagaimana proses penghapusan dilakukan. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan menyajikan hasil dari seluruh studi dan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan trayek R-104 disebabkan karena kemiripan rute dengan trayek R-105 dan terdapat pelayaran komersial PT. Pelni yang menyinggahi rute R-104, sehingga operasional kapal dinilai tidak lagi produktif meskipun hasil analisis SWOT pelayanan kapal perintis menunjukkan hasil yang progresif. Proses penghapusan trayek R-104 diusulkan oleh Pemerintah Daerah Merauke berkoordinasi dengan PPK Perintis Pangkalan Merauke, kemudian disampaikan kepada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut untuk dikaji lebih lanjut dan trayek R-104 secara resmi dihapuskan saat Rakornas Perintis.

Kata Kunci: kapal perintis, pangkalan Merauke, pemerataan, trayek

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1957 telah ditetapkan sebagai negara kepulauan saat Deklarasi Juanda dengan ciri khas nusantara yang diperkuat oleh Konvensi Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*). Menurut Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi (Pushidros) luas wilayah secara menyeluruh yang dimiliki Indonesia adalah 8,300.000 km² dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. Disamping itu, data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa luas Negara Indonesia sebesar 62% adalah laut dan perairan atau mencapai 6,32 juta km², sedangkan luas 38% sisanya adalah daratan atau sebesar 1,91 juta km².

Disamping banyaknya jumlah wilayah yang dimiliki oleh Indonesia, terdapat beberapa wilayah yang sulit untuk dijangkau sehingga masyarakat yang tinggal didalamnya cenderung belum berkembang karena sulit terjamah oleh pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah. Orientasi pembangunan bagi daerah yang sulit dijangkau terkendala oleh biaya mahal dengan hasil yang tidak sebanding dengan daerah yang memiliki infrastruktur memadai. Salah satu program pembangunan yang harus difokuskan adalah terbangunnya jaringan transportasi yang akan menghubungkan daerah yang masih sulit dijangkau, dengan angkutan di perairan yang menjadi sarana utamanya. Terdapat daerah berbentuk pulau-pulau kecil yang terpisah oleh perairan dan hanya dapat diakses dengan menggunakan angkutan di perairan saja sedangkan daerah ini umumnya tidak dilalui oleh pelayaran komersial akibat biaya transportasi yang cukup tinggi.

Berbagai macam jenis kapal digunakan untuk menghubungkan kegiatan manusia di satu wilayah dengan wilayah lain yang pada umumnya bertujuan agar terbentuknya keseimbangan dan keberlanjutan dalam proses perekonomian. Di wilayah Indonesia sendiri, terdapat banyak sekali moda transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. Transportasi umum banyak diminati oleh masyarakat karena memberikan efisiensi dalam segi waktu maupun biaya. Dalam menunjang kemudahan masyarakat, pemerintah menyediakan sarana transportasi umum angkutan laut bagi masyarakat yang diprogramkan melalui kapal perintis.

Pelayaran perintis merupakan penyediaan layanan angkutan di perairan dengan rute trayek yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menghubungkan daerah yang masih tertinggal, wilayah terpencil, atau wilayah terluar yang belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju, menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai, dan menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan. Daerah tersebut juga memiliki tingkat pendapatan penduduk yang masih rendah yang mana cenderung memiliki sumber daya manusia yang masih rendah pula. Penyusunan jaringan trayek perintis ini dilakukan oleh berbagai pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan angkutan laut nasional dengan tetap mempertimbangkan keterkaitannya dengan program pada sektor lain seperti hasil alam, hasil bumi, hasil sumber daya laut, destinasi wisata, kegiatan jual beli, perpindahan orang, dan sektor pendidikan dalam rangka mengembangkan potensi daerah. Setelah penetapan jaringan trayek ini akan diadakan evaluasi pada setiap tahun anggaran untuk mengukur sejauh mana peran kapal perintis terealisasi.

Adanya pelayanan publik angkutan laut perintis diharapkan dapat merajut konektivitas dengan memperlancar mobilisasi penumpang dan barang serta menunjang pertumbuhan ekonomi di wilayah 3TP sehingga dapat menjadi wilayah yang berkembang dan maju. Ketika daerah tersebut telah menjadi daerah berkembang, maka diharapkan pula adanya perkembangan dalam kualitas sumber daya manusia. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan turut serta dalam mewujudkan nawacita (sembilan prioritas pembangunan lima tahun kedepan) yang menjadi bagian dari visi Presiden Republik Indonesia. Dalam melaksanakan pelayanan perintis untuk daerah 3TP, digunakan kapal milik negara dan kapal milik operator swasta yang memenangkan tender dalam lelang umum. Salah satu kapal milik negara yang dioperasikan adalah KM. Sabuk Nusantara 91. Istilah Sabuk Nusantara diberikan kepada nama-nama kapal perintis yang dimaksudkan agar bermakna saling terikat atau menjadikan daerah di seluruh nusantara menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa trayek kapal perintis R-104 Pangkalan Merauke KM. Sabuk Nusantara 91 dihapuskan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan?
2. Bagaimana proses penghapusan trayek kapal perintis R-104 Pangkalan Merauke KM. Sabuk Nusantara 91 oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan?

KAJIAN PUSTAKA

a. Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian dalam suatu kegiatan dimulai dari penentuan sasaran kegiatan hingga tujuan dapat tercapai. Proses adalah langkah atau tahapan yang dilalui untuk mencapai hasil yang diinginkan dicapai serta mampu untuk menggambarkan prosedur seperti apa yang sebaiknya digunakan.

b. Penghapusan

Penghapusan trayek merupakan langkah peniadaan trayek dalam satu susunan jaringan trayek yang telah disepakati. Setelah dilakukan adanya penghapusan, maka trayek tersebut tidak lagi dioperasikan untuk melaksanakan pengangkutan.

c. Trayek

Trayek merupakan suatu lintasan pergerakan angkutan umum yang menghubungkan titik asal ke titik tujuan dengan melalui rute yang telah ditetapkan. Rute adalah suatu jaringan jalan yang dilalui oleh angkutan umum untuk melakukan pelayanan jasa.

d. Kapal Perintis

Angkutan laut perintis adalah angkutan di perairan yang bertujuan untuk menghubungkan daerah yang belum berkembang dengan wilayah lainnya dengan trayek yang telah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah.

e. Pangkalan Merauke

Pangkalan Merauke merupakan sebuah pelabuhan pangkal yang terletak di Kabupaten Merauke, Papua. Pelabuhan ini memiliki dermaga sepanjang 158 meter dan gudang terbuka seluas 600 meter². Pelabuhan juga dilengkapi dermaga kayu dengan panjang 58 meter dan lebar 4 meter, serta dermaga untuk kapal Pertamina dengan panjang 7 meter dan lebar 5 meter. Pada tahun 2021, jumlah trayek kapal perintis yang berada di pangkalan Merauke adalah sebanyak 8 trayek (R-100, R-101, R-102, R-103, R-104, R-

- 105, R-106, dan R-107) sedangkan pada tahun 2022, trayek R-104 dihapuskan sehingga pangkalan Merauke mengalami penurunan menjadi 7 trayek.
- f. KM. Sabuk Nusantara 91
 KM. Sabuk Nusantara 91 adalah salah satu kapal yang dioperasikan dalam pelaksanaan pelayanan publik angkutan laut perintis tahun 2021 di Pangkalan Merauke. Kapal penumpang ini melayani rute Merauke – Bade – Agats – Pomako – Kaimana – Tual – Dobo – Pomako – Agats – Bade – Merauke. Jumlah jarak yang ditempuh oleh kapal ini adalah sejauh 1949 km dengan 14 jumlah pelayaran dalam 1 round voyage.
 - g. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
 Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Ditlala) merupakan salah satu sub direktorat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang ditugaskan untuk merumuskan dan melaksanakan pengambilan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut.

Untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis memaparkan kerangka pikir penelitian dalam bentuk bagan sederhana.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian: Optimalisasi Kapal Perintis

METODOLOGI

Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan ketika praktek darat (prada) pada saat semester V dan VI selama 6 bulan. Waktu terhitung mulai tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan 18 Februari 2021.

b. Tempat Penelitian

Penelitian secara umum dilakukan di wilayah kerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 8, Gambir, Jakarta Pusat 10110. Fokus pengkajian dilakukan pada pangkalan Merauke yang mengusulkan penghapusan terhadap salah satu trayek kapal perintis yang dikelolanya yakni trayek R-104 yang menggunakan KM. Sabuk Nusantara 91.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan faktor yang sangat penting dalam pengumpulan data sebab dalam suatu penelitian harus memiliki subjek data yang memiliki informasi dengan jelas mengenai pengambilan dan pengolahan data tersebut. Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Sumber data penelitian merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan cara observasi di lokasi penelitian, wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam proses penghapusan trayek kapal perintis R-104 Pangkalan Merauke KM. Sabuk Nusantara 91.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, yakni melalui buku-buku, dokumen, literatur maupun referensi lain yang terkait dengan isi dalam penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Dalam melengkapi hasil penelitian, perlu adanya data akurat yang dapat menjamin tingkat validitasnya, sehingga perlu adanya beberapa metode dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Observasi

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan meneliti secara langsung dalam proses penghapusan trayek kapal perintis R-104 Pangkalan Merauke KM. Sabuk Nusantara 91.

b. Wawancara (interview)

Peneliti melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan proses penghapusan trayek kapal perintis R-104 Pangkalan Merauke KM. Sabuk Nusantara 91 yakni PPK Perintis di Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan PPK Perintis di Pangkalan Merauke.

c. Studi Dokumentasi

Peneliti menggunakan data dari arsip yang dimiliki oleh Direktorat Lalu Lintas dan

Angkutan Laut, PT. Pelni (Persero), dan Pangkalan Merauke. Metode ini dapat memperkuat dan mendukung informasi-informasi yang telah diperoleh dari hasil observasi lapangan dan hasil wawancara yang berhubungan dengan proses proses penghapusan trayek kapal perintis R-104 Pangkalan Merauke KM. Sabuk Nusantara 91.

Dari ketiga metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, peneliti memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian dan melakukan analisa SWOT berdasarkan kondisi aktual yang terjadi.

Teknik Analisis Data Kualitatif

Dalam penulisan penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, dengan cara menganalisa data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi di lapangan, dan dokumentasi hasil penelitian. Analisis data deskriptif kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data penelitian menjadi sebuah informasi dari kesimpulan penelitian yang mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah proses dalam pemilihan, penyerderhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang diperoleh di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bagian dari analisis data yang ditujukan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga penarikan kesimpulan dapat diverifikasi.

b. Penyajian Data

Dalam penyajian data peneliti menyajikan rangkuman data informasi tersusun mengenai suatu peristiwa yang akan memberikan kemudahan dalam penarikan kesimpulan dan disajikan dalam bentuk teks naratif. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat disajikan dalam bentuk seperti uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam proses penarikan kesimpulan, penulis menggabungkan seluruh data yang didapatkan dari proses penelitian berupa ringkasan yang penting berdasarkan analisis data dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca serta disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

DISKUSI

Penelitian dilakukan di Sub Angkutan Laut Dalam Negeri, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Ditlala) yang merupakan salah satu Sub Direktorat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang mengelola hal-hal terkait dengan kebijakan lalu lintas angkutan laut. Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri Berperan dalam pengadaan subsidi angkutan laut kapal perintis, perumusan pola trayek kapal perintis, serta pemantauan pemeliharaan kapal perintis. Selain bertanggung jawab atas angkutan laut perintis, Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri juga mengelola Sistem Informasi Manajemen

Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Simlala) yang digunakan untuk mengajukan permohonan pelayanan publik lalu lintas dan angkutan laut secara *online* dan pelayanan *Public Service Obligation* (PSO) terhadap kapal penumpang. Jaringan trayek kapal perintis merupakan hasil usulan dari pemerintah daerah yang berada di wilayah pelabuhan pangkal berkoordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) atau Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) setempat. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari KSOP atau KUPP akan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) perintis yang setiap tahun diadakan oleh Ditlala untuk menyampaikan hasil koordinasinya dengan pemerintah daerah setempat mengenai kebutuhan pengelolaan trayek. Usulan trayek kapal perintis dari setiap daerah mendeskripsikan secara rinci trayek apa saja yang dikelola oleh pelabuhan pangkalnya, gambaran umum dari pelabuhan pangkal dan pelabuhan singgah, rute pelabuhan yang disinggahi, spesifikasi kapal utama dan kapal pengganti yang dioperasikan, peta alur pelayaran yang dilayani oleh masing-masing kapal, total kebutuhan anggaran biaya yang diperlukan, serta penambahan atau pengurangan rute trayek.

Wilayah Merauke merupakan salah satu wilayah yang termasuk ke dalam wilayah 3TP sehingga keberadaan pelayaran perintis menjadi faktor pendukung dalam kemajuan ekonomi di wilayah tersebut terlebih wilayah tersebut hanya dapat dilalui oleh angkutan di perairan saja. Saat ini pemerintah terus berupaya agar wilayah Merauke dan wilayah 3TP lainnya dapat berkembang menjadi daerah maju. Ditlala sebagai instansi yang berwenang dalam program kapal perintis turut berperan aktif dalam mendukung perkembangan wilayah 3TP khususnya di pangkalan Merauke yang pada tahun anggaran 2021 mengoperasikan 8 trayek kapal perintis dengan 5 trayek dikelola oleh operator swasta dan 2 trayek penugasan kepada PT. Pelni. Pelayanan perintis di pangkalan Merauke telah cukup lama berlangsung. Pada evaluasi tahunan tahun anggaran 2021 terlihat adanya kemiripan trayek antara trayek R-104 dan trayek R-105. Kemiripan trayek ini kemudian berujung pada usulan penghapusan trayek R-104 pada tahun anggaran 2022.

Analisis Masalah

Proses penghapusan trayek kapal perintis merupakan suatu kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan terciptanya pemerataan jaringan trayek kapal perintis di Indonesia sesuai dengan kebutuhan setiap daerah yang memanfaatkannya. Adanya penghapusan trayek kapal perintis dapat meminimalisir armada kapal yang tidak lagi produktif digunakan di wilayah yang telah terlayani oleh angkutan laut lain, yang tidak sebanding dengan jumlah muatan penumpang dan barang yang diangkut. Setelah penghapusan trayek dilakukan, kapal yang sebelumnya digunakan akan dialihkan kepada daerah pangkalan pelabuhan lain yang lebih memerlukan untuk dilayani oleh armada kapal perintis.

Pembahasan Masalah

- a. Penyebab trayek kapal perintis R-104 Pangkalan Merauke KM. Sabuk Nusantara 91 dihapuskan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan. Berdasarkan hasil observasi, pelayanan kapal perintis menjadi salah satu penunjang bagi daerah 3TP untuk berkembang menjadi daerah yang berkembang dan tidak lagi mengalami ketertinggalan dari daerah yang sebelumnya sudah menjadi daerah yang

maju. Dengan dioperasikannya kapal perintis diharapkan terwujudnya pemerataan akses transportasi yang merupakan hak bagi setiap warga negara di Indonesia. Pangkalan Merauke dengan wilayah yang sebagian besar perairan merupakan salah satu wilayah yang memanfaatkan tersedianya pelayanan kapal perintis untuk terhubung dengan daerah disekitarnya. Dalam studi dokumentasi di Ditolala, terdapat 8 trayek yang dioperasikan pada tahun anggaran 2021 dan telah mempermudah masyarakat di wilayah Merauke untuk bepergian ke daerah lain dengan berbagai tujuan yang hendak dicapai seperti berdagang, bekerja, menempuh pendidikan, dan sebagainya. Selain itu, hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa pelayanan kapal perintis memiliki peluang untuk menjangkau cakupan wilayah yang lebih luas dengan kelebihan yang dimilikinya.

Pelayanan kapal perintis dievaluasi secara menyeluruh setiap tahun untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memaksimalkan efektifitas tujuan yang hendak dicapai. Wawancara dengan PPK Perintis Pangkalan Merauke, pada evaluasi di tahun anggaran 2021 terlihat adanya kemiripan rute trayek di pangkalan Merauke yakni trayek R-104 dan R-105. Kemiripan ini terlihat pada pelabuhan singgah yang dilalui oleh masing-masing trayek sehingga dinilai produktifitas keduanya menurun jika dibandingkan dengan volume jumlah muatan yang diangkut. Dengan kata lain jumlah kebutuhan pada dua trayek ini dapat diatasi dengan satu pengoperasian trayek kapal perintis saja.

Disamping itu keberadaan angkutan pelayaran komersial dari PT. Pelni dinilai oleh Pemerintah Daerah Merauke telah memenuhi jumlah kebutuhan pelayanan angkutan pada rute tersebut. Dalam hasil wawancara dengan operasional PT. Pelni, pelayaran komersial merupakan kapal penumpang milik PT. Pelni yang biayanya dikeluarkan berdasarkan perhitungan Satuan Dasar Unit Muatan (SDUM) dari penugasan yang diberikan kepada PT. Pelni. Bentuk pelayanan komersial ini hanya diperuntukkan bagi muatan barang, sedangkan untuk pengangkutan penumpang disediakan subsidi Public Service Obligation (PSO). Kapal komersial PT. Pelni yang melayani rute singgah pada trayek R-104 antara lain KM. Tatamailau, KM. Sirimau, dan KM. Leuser.

- b. Proses penghapusan trayek kapal perintis R-104 Pangkalan Merauke KM. Sabuk Nusantara 91 dihapuskan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan.

Usulan penghapusan pada trayek R-104 pangkalan Merauke KM. Sabuk Nusantara 91 berasal dari Pemerintah Daerah Merauke terkait adanya kemiripan dengan trayek R-105 dan mempertimbangkan lintasan pada trayek R-104 yang telah dilintasi oleh pelayaran komersial PT. Pelni. Usulan ini kemudian dikoordinasikan kepada PPK Perintis di pangkalan Merauke. Hasil dari koordinasi tersebut disampaikan oleh PPK Perintis Pangkalan Merauke kepada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan. Pembahasan usulan penghapusan trayek dilaksanakan pada saat pra-Rakornas untuk digali lebih lanjut mengenai data dan dokumen yang harus dilengkapi. Berita acara usulan trayek Provinsi Papua yang memuat usulan agar dilakukan pengkajian ulang terhadap trayek R-104 dan R-105 yang dinilai hampir sama dan cenderung ramai pada rute R-105 akan peneliti sajikan pada lampiran 8. Selain itu, terdapat diskusi mengenai pengalihan trayek yang dihapus kepada pelabuhan pangkal lain yang lebih memerlukan armada kapal untuk dioperasikan. Setelah pembahasan di pra-Rakornas ini, pengesahan penghapusan trayek dan pengalihannya kepada trayek di

pelabuhan pangkal lain secara resmi dilakukan pada saat pelaksanaan Rakornas perintis. Berita acara saat pelaksanaan Rakornas yang secara resmi menyatakan bahwa trayek R-104 dihapuskan dari jaringan trayek pelayanan kapal perintis tahun anggaran 2022 akan peneliti sajikan pada lampiran 9. Secara sederhana, alur proses penghapusan trayek R-104 pangkalan Merauke KM. Sabuk Nusantara 91 adalah:



Gambar 2. Alur Penghapusan Trayek Kapal Perintis: Diusulkan oleh Pemerintah Daerah Merauke dan diputuskan pada saat Rapat Koordinasi Nasional Perintis

KESIMPULAN

- a. Trayek kapal perintis R-104 Pangkalan Merauke dihapuskan karena adanya kemiripan rute trayek dengan R-105. Pertimbangan lain yang turut mendukung penghapusan trayek adalah adanya rute komersial yang dioperasikan oleh PT. Pelni dan dinilai telah menjangkau seluruh pelabuhan singgah yang semula terdapat pada trayek R-104, sehingga operasional kapal perintis dipandang tidak lagi produktif sebagai fungsinya untuk menghubungkan daerah yang kesulitan dalam akses transportasi. Berdasarkan hasil SWOT, pelayanan kapal perintis di Pangkalan Merauke memiliki posisi strategis progresif sebagai pangkalan pelabuhan yang menyediakan pelayaran kapal perintis bagi masyarakat di wilayah Merauke sehingga dapat terhubung dengan wilayah lain disekitarnya, sehingga keberadaan kapal perintis dinilai penting dalam mendukung perkembangan wilayah.
- b. Proses penghapusan trayek kapal perintis R-104 Pangkalan Merauke KM. Sabuk Nusantara 91 berasal dari usulan Pemerintah Daerah Merauke yang berkoordinasi dengan PPK Perintis di Pelabuhan Pangkal Merauke. Setelah diputuskan bahwa trayek akan dihapuskan, PPK Perintis di Pelabuhan Pangkal Merauke menyampaikan hasil koordinasi yang diperoleh kepada Ditlala. Usulan penghapusan ini kemudian diterima oleh Ditlala dan secara resmi trayek R-104 Pangkalan Merauke dihapuskan dalam jaringan trayek kapal perintis tahun 2022, dan dialihkan ke Pangkalan Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., Sukmana, D.J. dan Andriani, H. 2020. Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu. (Issue March).
- Dephub.go.id (2022, 8 Januari). Transportasi Laut, Urat Nadi Perekonomian Nasional. Diakses pada 8 Januari 2022, dari <http://dephub.go.id/post/read/transportasi-laut-urat-nadi-perekonomian-nasional-60496>
- Dephub.go.id (2022, 8 Januari). Dirjen Hubla, Pelayaran Perintis Berperan Besar bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Diakses pada 8 Januari 2022, dari <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/5743/dirjenhublapelayaranperintisberperan-besar-bagi-pertumbuhan-ekonomi-nasional>
- Dephub.go.id (2022, 18 Januari). Dirjen Hubla, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Diakses pada 18 Januari 2022, dari <https://hubla.dephub.go.id/home/page/unit-kerja/direktorat-lalu-lintas-angkutan-laut?cv=1>
- Dewi, R. P. 2019. Studi Kasus - Metode Penelitian Kualitatif. April 2015, hal. 31–46. <https://doi.org/10.31227/osf.io/f8vwb>
- Indonesiabaik.d (2022, 7 Januari). Indonesia Kaya Potensi Kelautan dan Perikanan. Diakses pada 7 Januari 2022, dari <https://indonesiabaik.id/infografis/infografis-indonesia-kayapotensikelautandanperikanan#:~:text=Indonesia%20memiliki%20sekitar%2017.500%20pulau,mencapai%206%2C32%20juta%20km2.>
- Kelaspintar.id (2022, 7 Januari). Daratan dan Lautan, Berapa Luas Wilayah Indonesia. Diakses pada 7 Januari 2022, dari <https://www.kelaspintar.id/blog/tak-berkategori/daratandanlautanberapaluaswilayahindonesia14400/#:~:text=Berdasarkan%20Informasi%20dari%20Badan%20Informasi,Indonesia%20adalah%205.180.053%20km%C2%B2>
- Latif, M., Serikat, A. dan Publik, K. 2014. Pelayaran Perintis Dalam Perspektif Sejarah. 2013.
- Menteri PUPR. 2020. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Menteri Perhubungan Republik Indonesia, 13.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2016. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2010
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. UU RI No. 17 Tahun 2008. Pelayaran.
- Priatno, D. H. dan Samudro. 2019. Konsep Kapal Pengumpan Reguler untuk Mendukung Angkutan Laut Perintis di Wilayah Pulau-Pulau Terpencil. Wave: Jurnal Ilmiah Teknologi Maritim, 4(1), 12–20. <https://doi.org/10.29122/jurnalwave.v4i1.3539>
- Rohim, A. 2019. Analisis Pola Data Transaksi di Pelabuhan dengan Metode Association Rule. (Thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta). Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Repository. <https://repository.upnvj.ac.id/1739/?cv=1>
- Sugiyono. 2016. 13.30.0054 Go Albert Kurniawan BAB III. Metode Penelitian, vol. 17, hal. 317–317.
- Suyono, R. S. dan Mukti, E. T. 2018. Studi Dan Evaluasi Operasional Pelayaran Perintis Di Indonesia. Jurnal Teknik Sipil, 18(2). <https://doi.org/10.26418/jtsft.v18i2.31216>